

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA BUMI ETAM,
KECAMATAN KAUBUN, KABUPATEN
KUTAI TIMUR**

Yohanes Richardo Nanga Wara, Cathas Teguh Prakoso

**eJournal Administrasi Publik
Volume 10, Nomor 1, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur

Pengarang : Yohanes Richardo Nanga Wara

NIM : 1502015100

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 18 Januari 2022

Pembimbing

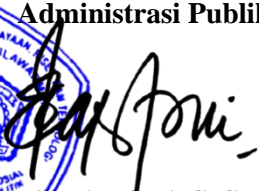


Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Koordinator Program Studi Administrasi Publik
Volume : 10	
Nomor : 1	Dr. Fajar Apriani, S. Sos, M.Si
Tahun : 2022	NIP. 19830414 200501 2 003
Halaman : 5965-5978	

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA BUMI ETAM, KECAMATAN KAUBUN, KABUPATEN KUTAI TIMUR

Yohanes Richardo Nanga Wara¹, Cathas Teguh Prakoso²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam meningkatkan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan BUMDes tersebut. Berdasarkan indikator pengelolaan (manajemen) yaitu perencanaan, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data terdiri dari hasil wawancara, observasi dan dokumen. Key Informan dan Informan dipilih melalui metode purposive sampling. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis dengan teknik interaktif dari Milles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan BUMDes Etam Mandiri di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dari aspek perencanaan, pengelolaan BUMDes belum berjalan maksimal karena terdapat program lapangan futsal, pelayanan listrik PLN dan warung makan sementara berjalan sedangkan mangrove belum terjalankan. Dari aspek pelaksanaan program masih perlu diperbaiki dan dimaksimalkan kembali dari kendala yang ada agar BUMDes dapat memberikan nilai kebermanfaatn untuk seluruh lapisan masyarakat. Pada kegiatan monitoring, perlu ada komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antar pihak guna merealisasikan program yang ada sehingga dapat meminimalisir resiko yang dihadapi BUMDes. Dari hasil evaluasi, pengelolaan BUMDes masih belum baik karena secara target dari awal berdirinya BUMDes sejak tahun 2018 hingga saat ini program –program yang ada belum berjalan maksimal. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya antusias dari warga desa, dan factor penghambatnya adalah minimnya SDM, sarana, dana dan belum tingginya kesadaran bersama dalam mengembangkan BUMDes Etam Mandiri

Kata Kunci : Pengelolaan BUMDes, Pembangunan Desa, BUMNDes Etam Mandiri

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: elisabetnatalia8@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa atau sering disingkat BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal kepasar. BUMDes juga merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salahsatu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa diantaranya pembangunan fisik Desa dan keuangan Desa.

BUMDes memiliki peran sangat besar dalam hal ini untuk mendorong ekonomi desa yang bertumpu pada pendapatan desa. Artinya tata kelola program tersebut yang profesional sesuai dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik sehingga kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal bisa menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi. Dengan adanya kebijakan tersebut maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan pendorong ekonomi mandiri yang berada di desa.

Salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur adalah BUMDes “Etam Mandiri” yang berkedudukan di wilayah Desa Bumi Etam. BUMDes ini berdiri sekitar sejak tahun 2018 dan disahkannya pada tahun 2019. Berdasarkan AD (Anggaran Dasar) BUMDes Kaibun, asas pembentukan BUMDes ada lima yakni ialah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabilitas. Hal yang melatarbelakangi pembentukan BUMDes ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan perekonomian desa yang mampu berdikari secara mandiri tanpa harus selalu mengandalkan anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Sebagai gambaran perencanaan pelaksanaan usaha BUMDes Etam Mandiri, dari observasi penulis dilapangan, diketahui ada tiga usaha inti Program BUMDes Etam Mandiriyaitu usaha Futzal, Warung Makan dan bekerjasama dengan PLN memfasilitasi Pemasangan Listrik Rumah.

Dengan tidak berjalannya beberapa perencanaan kegiatan usaha BUMDes tersebut, maka akhirnya program-program kegiatan BUMDes hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Padahal diharapkan dengan ketiga hal tersebut, pendapatan asli desa akan meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian perlu dilakukan untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai lembaga dalam peran untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur.

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan program BUMDes dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur ?

2. Apa saja kontribusi BUMDes terhadap pembangunan di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program BUMDes di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur ?

Kerangka Dasar Teori

Pradigma Pelayanan Publik

Menurut Thoha (dalam Wirman Safri, 2012:193), secara garis besar ideinti pelayanan publik klasik adalah sebagai berikut :

- a. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Public Policy dan administration berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
- c. Pelayanan publik hanya memainkan peran yang lebih kecil pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan kebijakan publik.
- d. Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
- e. Program-program kegiatan di administrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi
- f. Nilai-nilai utama (the prime values) administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
- g. Pelayanan publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup sehingga warga negara keterlibatannya amat terbatas peran pelayanan.

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik klasik merupakan suatu paradigma pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan penyelenggaraannya terdapat pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan harus dilakukan oleh birokrasi pemerintah untuk menjalankan sebuah proses administrasi. Pelayanan publik hanya memainkan peran yang lebih kecil pada proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk pelaksanaan kebijakan publik

Manajemen Pelayanan Publik

Pengertian manajemen pelayanan publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keabab 2008:93) adalah sebagai upaya pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan pelayanan.

Kemudian definisi Manajemen Pelayanan Publik menurut Ratmino dan Atik (2006:4) merupakan sebuah proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun

rencana serta implementasi, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik itu sendiri secara maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pelayanan Publik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan proses perencanaan, pelaksanaan atau bentuk pengimplementasian dan pengkoordinasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang baik kepada publik untuk dapat mencapai tujuan.

Manajemen

Manajemen adalah usaha atau sebuah cara untuk mencapai/menggapai tujuan tertentu melalui kegiatan/usaha orang lain. (Koontz dalam Winarsih 2014:5). Menurut Terry dalam Winarsih (2014:44). Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, serta penggerakan dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan arah serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan SDM serta sumber daya lain.

Manajemen ialah suatu proses perencanan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut serta penggunaan Sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. (Stoner dalam Brantas 2009:19), sumber yang sama Hilman dalam Brantas (2009:10) Manajemen ialah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama.

Menurut beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan kemajuan sebuah organisasi.

Badan Usaha Mikil Desa (BUMDesa)

BUM Desa adalah pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUM Desa sebagai lembaga sosial yang berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan layanan sosial. BUM Desa sebagai lembaga komersial yaitu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, BUM Desa bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Setiap pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa yang didirikan menuntut prakarsa masyarakat sesuai potensi yang dapat dikembangkan sumberdaya lokal dan permintaan pasar. Pemerintah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pemenuhan

lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUM Desa. Operasionalisasi diserahkan pada masyarakat desa. Masyarakat desa perlu dipersiapkan agar dapat menerima gagasan baru mengenai ekonomi yang memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial tersebut. Persiapan yang dipandang paling tepat berfokus pada sosialisasi, pendidikan, serta pelatihan kepada pemangku kepentingan untuk peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, ketua suku dan ketua kelembagaan di perdesaan).

Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan pengelolaan BUMDes dalam rangka peningkatan pembangunan desa adalah menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta kontribusi BUMDes dalam pembangunan yang baik untuk mencapai efisiensi yang baik sehingga mampu mewujudkan Desa yang mandiri sesuai dengan tujuan program-program BUMDes yang akan dicapai di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan guna untuk mengetahui lebih jelas tentang upaya dalam peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan, deskriptif adalah yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan dipenelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Fokus penelitian merupakan identifikasi yang rinci kedalam indikator yang akan diukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah penulis dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan BUMDes, terdiri dari kegiatan-kegiatan
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan

- c. Monitoring
- d. Evaluasi
2. Kontribusi BUMDes dalam Pembangunan Desaa
 - a. Pembangunan Fisik
 - b. Desa Keuangan Desa
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan BUMDes Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan informant sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi. Pemilihan informant didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research) atau pengumpulan data sekunder, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku serta data-data yang terkait dengan topik penelitian disertai dengan undang- undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan.
2. Penelitian lapangan (field work research) yaitu penelitian yang digunakan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yang sebagai berikut :
 - a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian. Observasi ini membantu peneliti dalam mengetahui dan menganalisa keadaan yang sebenarnya.
 - b. Interview atau wawancara menurut Bungin, (2008:08) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informant dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara ditujukan pada informant terpilih yang dilakukan dengan pertimbangan relevansinya dengan tujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Dokumentasi yaitu, pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai obyek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana, (2014:31-33) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : *Data Condensation, Data Display, dan Data Concluding Drawing/Verivication.*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur

Berikut penulis sampaikan hasil penelitian dari fokus penelitian yaitu pengelolaan BUMDES Bumi Etam Kaibun yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan organisasi untuk penyusunan rencana kerja yang berguna sebagai panduan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan BUMDes sangat penting dilakukan agar tujuan dari pendirian BUMDes dapat tercapai dan menjadi arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BUMDes.

Penyusunan rencana program kerja Badan Usaha Milik Desa “Etam Mandiri” ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab yang metode serta tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pembinaan, pengembangan, pengadaan barang dan jasa.

Dari penelitian, perencanaan BUMDes dilakukan agar memiliki pedoman untuk menganalisa situasi dengan mendorong pendapatan ekonomi masyarakat secara mandiri, agar mencapai sebuah tujuan meningkatkan pembangunan Desa melalui program yang dikelola serta kegiatan-kegiatan di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur.

Perencanaan pembangunan Desa agar adanya persiapan dengan melakukan peninjauan kepada Desa Bumi Etam mengenai peluang pendirian pembangunan ekonomi melalui program BUMDes. Selain itu melakukan pemetaan dan pembacaan situasi tentang peluang pemberdayaan yang menjadi kebutuhan masyarakat, menyusun aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau Perdes (Peraturan Desa), Peraturan Menteri Desa dan menentukan struktur pembentukan kepengurusan pengelola BUMDes, target, rencana kerja serta program-program yang dicanangkan secara bersama demi memiliki nilai kebermanfaatannya bagi masyarakat umum.

Hasil penelitian sub focus ini maka diketahui bahwa program yang ditetapkan untuk dikembangkan adalah lapangan fitzal, warung makan, pelayanan Listrik PLN dan taman mangrove. Program usaha tersebut direncanakan untuk meningkatkan pendapatan Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun guna menunjang perekonomian Desa yang lebih mandiri serta tidak bergantung pada anggaran dari Pemerintah Kabupaten.

Hasil penelitian tentang pengelolaan menurut Fayol dan Brantas dalam manajemen, perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting

dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Landasan berdirinya BUMDes mengacu pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diawali dengan MUSDES (Musyawarah Desa) pembentukan BUMDes serta perekrutan personalia dalam kepengurusan BUMDes kemudian yang tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bumi Etam Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Etam Mandiri” Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Berdasarkan indikator perencanaan tentang Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bumi Etam kurang baik. Hal ini dikarenakan berdirinya BUMDes sudah sejak dari tahun 2018 namun hingga 2021 ternyata belum sempurna atau kurang maksimal berjalannya program-program sewa pakai gedung futsal, warung makan, wisata mangrove dan layanan listrik PLN.

Pelaksanaan

Beberapa hal-hal yang dilakukan dalam melaksanakan program-program BUMDes yaitu pembangunan sarana dan prasarana sesuai rencana unit usaha oleh Pemerintah Desa, mempekerjakan masyarakat dalam proses pembangunan dan diberikan upah sesuai standar serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat menjaga fasilitas yang digunakan agar tetap baik.

Mengenai pengelolaan unit usaha dikelola langsung oleh pengurus BUMDes yang aktif bekerja sama dengan pihak ketiga dan didampingi oleh Pemerintah Desa sebagai tempat BUMDes bernaung yang dalam hal ini unit usaha dalam BUMDes tetap berjalan dengan mengikuti kondisi dilapangan walaupun ditengah perjalanannya terdapat kendala sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor-faktor seperti situasi Covid-19, keuangan Desa yang terbatas serta aturan pengelolaan keuangan. Selain itu mengenai strategi yang dilakukan dalam menjalankan BUMDes yaitu dengan memaksimalkan sarana unit usaha yang belum lengkap, promosi unit usaha kepada masyarakat melalui surat resmi atau sosial media, pendekatan dengan pihak ketiga guna mendapat dukungan baik dana maupun sarana yang dapat meningkatkan ekonomi Desa.

Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan ini misalnya program Futsal sejauh ini masyarakat terlibat secara langsung untuk melakukan penyewaan terhadap lapangan futsal. Selain itu terlibat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pelaksanaannya guna memastikan program kerja yang ada dapat berjalan. Sejauh ini jalur koordinasi antara pengurus dengan Ketua BUMDes berjalan baik, begitupula koordinasi bersama pihak Pemerintah Desa maupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa) walaupun dengan stakeholder yang masih kurang. Dalam internal kepengurusan BUMDes sejauh sudah aktif hanya saja kurangnya sumberdaya manusia yang mumpuni sehingga program yang berjalan kurang maksimal dan belum sesuai dengan target. Namun, dari Ketua BUMDes

Etam Mandiri terus mengarahkan anggota dalam melaksanakan program, misalnya menjelaskan tentang strategi-strategi dengan rapat bersama kepengurusan dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan dari pengelolaan BUMDes Etam Mandiri dalam meningkatkan pembangunan Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan bahwa ada tiga program yang sedang dijalankan ialah lapangan futzal, warung makan Desa, layanan listrik PLN sementara program pengelolaan mangrove belum terlaksana. Kemudian pelaksanaan BUMDes mengacu dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang diawali dengan Musdes (Musyawarah Desa) pembentukan BUMDes serta perekrutan personalia dalam kepengurusan BUMDes dan BUMDes serta perekrutan personalia dalam kepengurusan BUMDes kemudian yang tertuang dalam keputusan Kepala Desa Bumi Etam Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Etam Mandiri” Desa Bumi Etam per tanggal 05 November 2018.

Monitoring

Monitoring merupakan sebuah pemantauan untuk memperoleh sumber informasi dari dampak-dampak pembangunan BUMDes. Monitoring juga yang dilakukan dengan menganalisa guna mengetahui tingkat sebab dan akibat dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kepengurusan BUMDes “Etam Mandiri”, Badan Pengawas yang diketuai oleh Kepala Desa Bumi Etam dan anggota secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi.

Proses monitoring ini dilakukan oleh Pengurus dalam memaksimalkan program BUMDes agar memenuhi kekurangan sarana dan prasarama BUMDes guna memaksimalkan unit usaha yang dikelola. Pentingnya monitoring sebab sangat dibutuhkan guna mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah berjalan demi untuk perbaikan kinerja kerja setiap pengurus juga meningkatkan pendapatan Desa dan tertib administrasi. Selain itu monitoring yang dilakukan agar mampu mengoptimalkan program-program BUMDes dengan melakukan permohonan oleh Pengurus kepada Pemerintah Desa serta Badan Pengawas untuk mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan unit usaha yang sedang berjalan.

Penelitian mengenai monitoring dengan melibatkan instrumen Desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BABINSA (Bintara Pembina Desa), Pendamping Desa dan Kecamatan guna memverifikasi realisasi pelaksanaan pembangunan dilapangan sangatlah penting dalam menjaga dan mengontrol agar kebijakan BUMDes yang sedang berjalan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dantepat sasaran.

Evaluasi

Dari hasil wawancara dapat penulis artikan bahwa tujuan dari sebuah evaluasi BUMDes ialah untuk menilai berjalannya kinerja program-program BUMDes, karena banyaknya kendala baik secara program maupun kendala dalam struktur yang kapasitas individunya masih kurang.

Sementara yang mestinya untuk dievaluasi ialah program BUMDes misalnya warung makan BUMDes, hutan mangrove yang akan dikelola serta PLN karena sejauh ini masih terfokus pada satu bidang saja yaitu program futsal yang juga belum maksimal. Pentingnya juga untuk tidak hanya mengandalkan anggaran Desa Bumi Etam yang masih sangat terbatas, yaitu dengan bekerja sama bersama stakeholder yang berada di wilayah Kecamatan Kaubun misalnya bekerja sama dengan perusahaan yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya yang menjadi utama dievaluasi ialah progress yang masih minim, keuangan yang masih terbatas serta belum meratanya sumberdaya manusia anggota dalam struktural BUMDes.

Sebuah evaluasi dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengetahui kinerja juga dalam mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian sebuah program. Evaluasi terhadap pembangunan juga dapat kita artikan sebagai suatu proses penilaian terhadap target keberhasilan maupun kegagalan dari pembangunan yang telah dilakukan. Setelah beberapa bulan berjalan unit usaha dari program BUMDes, semua berjalan dengan sistem yang baik sehingga menarik minat pelanggan serta dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang saat ini untuk membiayai kebutuhan baik honor pengurus maupun belanja perlengkapan lainnya yang dapat menunjang unit usaha tersebut. Bentuk-bentuk yang dilakukan dalam proses evaluasi BUMDes baik terhadap program maupun pengurus yaitu dengan mengevaluasi kinerja setiap Pengurus, mengevaluasi buku administrasi dan mengevaluasi program unit usaha yang sedang berjalan.

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam evaluasi yaitu Pemerintah Desa, Badan Pengawas, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pendamping Desa. Kemudian evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja BUMDes yaitu dengan memaksimalkan tugas dan fungsi setiap pengurus sesuai aturan yang tertuang dalam SK BUMDes dan merencanakan pelatihan Pengurus. Evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan guna memperbaiki kinerja serta tata kelola dalam pelaksanaan unit usaha dilapangan. Beberapa langkah yang digunakan dalam evaluasi ialah melalui rapat evaluasi di ruang rapat Kantor Desa Bumi Etam yang dihadiri oleh unsur-unsur terkait lainnya guna mengetahui hasil kerja serta keuangan yang diperoleh dari unit usaha.

Evaluasi terhadap pembangunan dapat kita artikan sebagai suatu proses penilaian terhadap target keberhasilan maupun kegagalan dari program yang telah diterapkan. Sebuah evaluasi dalam kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengetahui kinerja juga dalam mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian sebuah program. Yang dievaluasi ialah program BUMDes misalnya warung makan

BUMDes, hutan mangrove yang akan dikelola serta PLN karena sejauh ini masih terfokus pada satu bidang saja yaitu program futsal yang juga belum maksimal. Pentingnya juga untuk tidak hanya mengandalkan anggaran Desa Bumi Etam yang masih sangat terbatas, yaitu dengan bekerja sama bersama stakeholder yang berada di wilayah Kecamatan Kaibun misalnya bekerja sama dengan perusahaan yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya yang menjadi utama dievaluasi ialah progress yang masih minim, keuangan yang masih terbatas serta belum meratanya sumberdaya manusia anggota dalam struktural BUMDes.

Pembangunan Fisik

Melalui program BUMDes sudah seharusnya memiliki peran dalam pembangunan sebuah Desa, melalui program-program BUMDes bisa melibatkan langsung dalam upaya mendukung pemerintah Desa untuk mewujudkan Desa yang mandiri. Dengan membangun warung makan Desa dan lapangan Futsal Desa sangat diharapkan dapat menggairahkan perekonomian Desa yang nantinya dapat menjadi magnet bagi partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan fisik Desa, BUMDes Etam Mandiri berkontribusi melalui ide dan gagasan guna percepatan pembangunan semua bidang usaha yang telah direncanakan. Mengingat BUMDes sebagai pengelola unit usaha, dimana semua pembangunan yang dibiayai oleh APBDes dikerjakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan setelah selesai pembangunan akan diserahkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) kepada BUMDes untuk memulai tahapan pengelolaan.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis artikan bahwa tujuan utama dari Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) membawa kontribusi dalam segi pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaibun.

Selain itu terkait keuangan Desa, BUMDES turut serta memberikan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan program-program. Keuangan Desa menjadi objek yang sangat vital karena itu pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan serta pelaksanaan harus sebaik mungkin.

BUMDes Etam Mandiri awalnya mendapat dana operasional untuk belanja kebutuhan kantor yang dimana sampai dengan saat ini BUMDes belum lagi mendapatkan dana, mengingat unit usaha pengewaan Gedung Futsal yang dikelola saat ini sudah bisa menghasilkan PADes. Namun memasuki masa pandemi, unit usaha tersebut sementara ditutup untuk membatasi kerumunan dan aktifitas yang sekiranya dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Desa Bumi Etam. Untuk keuangan dari hasil pengelolaan unit usaha yang secara berkala dilaporkan kepada pemerintah Desa Bumi Etam.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis sampaikan bahwa bentuk

antusias tersebut menjadi bukti bahwa antara Pemerintah Desa melalui program BUMDes dapat menjalin kerjasama baik bersama masyarakat maupun beberapa pihak stakeholder dalam menata pembangunan Desa yang lebih secara pembangunan Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara ternyata problematika yang dihadapi oleh Pengurus BUMDes sehingga beberapa program tidak berjalan maksimal, karena kurangnya SDM, kondisi anggaran dalam membantu kerja-kerja program BUMDes lebih lanjut hal ini menyebabkan kendala dalam mengejar target keberhasilan BUMDes tersebut sehingga perlunya dalam bekerjasama dengan berbagai pihak-pihak stakeholder. Komunikasi BUMDes terhadap masyarakat di Desa Bumi Etam perlu ditingkatkan serta perlunya memaksimalkan kembalisan prasarana yang masih belum lengkap.

Penutup

Kesimpulan

1. Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur belum cukup berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mestinya ada beberapa kendala yang mesti diperbaiki agar proses pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan secara optimal dari program-program yang ada.
 - a. Terdapat empat program yang ingin dikembangkan Bumdes, yaitu lapangan futzal, pelayananan listrik PLN dan warung makan dan taman mangrove.
 - b. Tiga dari pertama telah dilaksanakan walaupun belum optimal, sedangkan program ke empat belum terlaksana sama sekali.
 - c. Pelaksanaan program masih belum dimonitoring dengan baik hal ini dibuktikan dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pihak yang dilibatkan sebagai instrumen dalam memonitoring berjalannya BUMDes.
 - d. Penilaian (evaluasi) tentang pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai masih belum baik karena secara target dari awal berdirinya BUMDes sejak tahun 2018 hingga saat ini ternyata program-program yang ada belum berjalan secara maksimal.

Saran

1. Perlu adanya pelaksanaan kembali Musdes (Musyawarah Desa) terkait aturan yang perlu ditinjau terhadap kepengurusan BUMDes yang terhitung telah berakhir masa periode saat ini terlebih program-program BUMDes yaitu lapangan futzal, pengelolaan mangrove, warung makan Desa dan listrik PLN BUMDes yang belum berjalan maksimal sehingga
2. Fasilitas unit usaha yang belum memadai misalnya toilet, kursi, kipas angin, kulkas, papan skor digital, lemari rak, fasilitas warung BUMDes, dapur,

gapura selamat datang, loket tiket, mushola, gazebo yang belum tersedia dll sehingga perlunya untuk segera ditingkatkan fasilitas unit usaha tersebut.

3. Kurangnya tenaga pelaksana yang benar-benar memiliki keterampilan dibidangnya, sehingga perlunya untuk melibatkan sumberdaya manusia, Pengurus BUMDes perlu melakukan open recruitmen keanggotaan guna membantu kerja-kerja pelaksanaan programatik.
4. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung BUMDes, maka sangat perlunya membangun sinergitas antara pihak BUMDes bersama pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Kaubun maupun pihak stakeholder yang berada di wilayahh Kecamatan Kaubun Desa Bumi Etam sehingga perlunya adanya koordinasi yang lebih intens lagi antara pihak BUMDes, Pemerintah Desa Bumi Etam, Pemerintah Kecamatan Kaubun dan stakeholder yang ada untuk membantu jalannya program misalnya dalam hal pemberian anggaran, dll.

Daftar Pustaka

- Bratas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- David Wijaya, , 2018, BUM Desa, Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta: Gava Media
- Basrowi,. & Suwandi., 2008, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2013, Jakarta: Metode Penelitian.PT Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus. 2017. Manajemen Pelyanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Hasibuan, Melayu. 2007. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. 2006. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: PT Gramendia
- Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- _____, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X
Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pasal 87.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan

Pembubaran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Surat Keputusan Kepala Desa Bumi Etam Nomor 08 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Pengurus Badan Usaha
Arsip Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur